

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Buku Rencana Kerja Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Tahun Anggaran 2018 dapat kami selesaikan. Rencana Kerja Biro Pemerintahan dan Kerja Sama ini merupakan salah satu acuan dalam melaksanakan tugas Gubernur Jawa Barat yang didelegasikan kepada Biro Pemerintahan dan Kerja Sama, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui Buku Rencana Kerja ini, diharapkan dapat menggambarkan rencana kerja Biro Pemerintahan dan Kerja Sama pada Tahun 2018, sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.

Akhirnya kami berharap Buku Rencana Kerja Tahun 2018 Biro Pemerintahan dan Kerja Sama ini dapat diimplementasikan dan bermanfaat sebagai panduan perencanaan kerja tahunan.

Bandung, Mei 2017

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN KERJA SAMA,**

**Dr. Ir. H.M. TAUFIQ BUDI SANTOSO, M.Soc. SC**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19670421 199203 1 013**

## DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** -----i

**DAFTAR ISI** -----ii

**BAB I PENDAHULUAN** ----- 1-I

1.1. Latar Belakang ----- 1-I

1.2. Landasan Hukum -----6-I

1.3. Maksud dan Tujuan ----- 7 -I

1.4. Sistematika Penulisan -----8-I

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BIRO PEMERINTAHAN DAN KERJA  
SAMA TAHUN 2017** ----- 1-II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017 dan Capaian Renstra 2013-2018  
1-II

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Biro Pemerintahan dan Kerja Sama ----- 2-II

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Pemerintahan dan Kerja  
Sama 14-II

2.4. Review Terhadap RKPD Provinsi Jawa Barat 2017 ----- 18-II

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ----- 28-II

**BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN** ----- 1-III

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ----- 1-III

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Biro Pemerintahan dan Kerja Sama ----- 3-III

3.3. Program dan Kegiatan ----- 5-III

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Secara umum, Rencana Kerja adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Untuk dapat melaksanakan perencanaan pembangunan daerah tersebut maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) untuk jangka waktu 5 tahun ke depan dan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) sebagai pelaksanaan Renstra SKPD untuk jangka waktu tahunan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan daerah perlu disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 dinyatakan bahwa setelah menyusun Renstra, Perangkat Daerah merumuskan Rencana Strategis tersebut ke dalam rancangan Rencana Kerja dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menjadi momentum krusial bagi terselenggaranya reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja khususnya pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Reformasi birokrasi dan semangat peningkatan kinerja pemerintahan tersebut diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan, mulai dari Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah hingga Jangka Pendek. Oleh sebab itu, dalam konteks unit kerja sebagaimana ketentuan yang berlaku (Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999), maka di lingkungan unit kerja Biro Pemerintahan dan Kerja Sama disusun Rencana Kerja Biro

Pemerintahan dan Kerja Sama Tahun 2018 sebagai panduan mengenai kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2018.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra).

Seiring dengan perubahan SOTK Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, maka Renstra Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama yang telah dibuat untuk tahun 2013-2018 sudah tidak sesuai lagi karena nomenklatur Biro tersebut telah berubah menjadi Biro Pemerintahan dan Kerja Sama yang merupakan gabungan Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama dan Biro Pemerintahan Umum sehingga perlu dilakukan pembaharuan Rencana Strategis untuk tahun 2017-2018 dengan nama baru, yaitu Biro Pemerintahan dan Kerja Sama.

Dengan telah dilakukannya pembaharuan Rencana Strategis dengan nama Biro Pemerintahan dan Kerja Sama maka dibuatlah Rencana Kerja Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Tahun 2018. Rencana Kerja ini memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Biro Pemerintahan dan Kerja Sama serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif serta memperhatikan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Perkembangan reformasi di segala aspek bidang kehidupan dan pemerintahan serta demokratisasi yang semakin membaik membawa konsekuensi pada tuntutan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang semakin transparan dan akuntabel. Masyarakat semakin mengerti, kritis, dinamis dan aspiratif terhadap penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena itu lembaga pemerintah semakin dituntut untuk lebih baik dan dekat dengan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang menganut prinsip-prinsip

*good governance* ini juga akan menuntut adanya komunikasi antara pihak pemerintah dengan masyarakat.

Dinamika otonomi daerah yang terus merambah di setiap wilayah memberikan berbagai kontribusi positif serta dampak negatif dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dampak positif implementasi otonomi daerah adalah tumbuh dan berkembangnya prakarsa daerah menuju kemandirian dalam membangun daerahnya. Sedangkan dampak negatifnya, timbulnya tumpang tindih pusat, daerah dan antar daerah, terutama dalam pengelolaan sumberdaya alam, kewenangan dan kelembagaan daerah, tidak harmonisnya kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan daerah, misalnya peraturan pertanahan, tataruang, penanaman modal, perdagangan, perikanan, kelautan dan lain-lain. Akibatnya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat sangat tinggi yang mengakibatkan kreativitas masyarakat setempat beserta seluruh perangkat daerah dan kota menjadi kurang diberdayakan sedangkan kebijakan yang represif telah menghambat aspirasi daerah untuk menuntut keadilan atas kekayaan alam yang dimilikinya. Padahal secara konseptual prinsip-prinsip aturan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut :

- a. Pendelegasian Kewenangan (*Delegation of Authority*)
- b. Pembagian Pendapatan (*Income Sharing*)
- c. Kekuasaan (*Discretion*)
- d. Keanekaragaman dalam Kesatuan (*Uniformity In unity*)
- e. Kemandirian Lokal
- f. Pengembangan Kapasitas Daerah (*Capacity Building*)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan dapat merubah pola pikir (*Mind Set*) para penyelenggara pemerintahan sehingga terjadi interaksi antara penyelenggara pemerintahan dan masyarakat (*Civil Society*). Untuk meningkatkan pemerintahan yang bersih (*Good Governance*) dan berwibawa, diperlukan konsep pemahaman yang selaras, serasi dan seimbang antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan.

Berdasarkan rancangan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Biro Pemerintahan dan Kerja Sama merupakan salah satu unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan

perumusan kebijakan umum, pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif aspek pemerintahan dan kerja sama, meliputi urusan pemerintahan daerah, tata pemerintahan dan kerja sama yang menjadi kewenangan Provinsi, menyelenggarakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Biro Pemerintahan dan Kerja Sama mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan umum serta koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif dalam aspek pemerintahan dan kerja sama;
- b. penyelenggaraan administrasi Biro;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Biro;
- d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya..

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, Biro Pemerintahan dan Kerja Sama memiliki rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program Biro;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan umum aspek pemerintahan dan kerja sama;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan pelayanan administratif aspek pemerintahan dan kerja sama meliputi urusan pemerintahan daerah, tata pemerintahan dan kerja sama;
- d. menyelenggarakan supervisi aspek pemerintahan dan kerja sama meliputi urusan pemerintahan daerah, tata pemerintahan dan kerja sama;
- e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian aspek pemerintahan dan kerja sama meliputi urusan pemerintahan daerah, tata pemerintahan dan kerja sama;
- f. menyelenggarakan fasilitasi urusan pemerintahan daerah;
- g. menyelenggarakan fasilitasi tata pemerintahan;
- h. menyelenggarakan fasilitasi kerja sama;

- i. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ketatausahaan Biro dan urusan pemerintahan daerah, tata pemerintahan dan kerja sama;
- j. menyelenggarakan pembinaan ketatausahaan, teknis fungsional aspek pemerintahan dan kerja sama;
- k. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi ketatausahaan, urusan pemerintahan daerah, tata pemerintahan dan kerja sama;
- l. menyelenggarakan perumusan bahan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja (PK), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup Biro;
- m. menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik (PIP);
- n. menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP);
- o. menyelenggarakan pengkoordinasian dan membina Bagian;
- p. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Biro;
- r. menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial aspek pemerintahan dan kerja sama;
- s. menyelenggarakan penyampaian saran, pertimbangan aspek pemerintahan dan kerja sama sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- t. memimpin penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bagian;
- u. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Biro; dan
- v. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **1.2 Landasan Hukum**

- a. TAP MPR-RI Nomor XI/MPR/98 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- j. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- m. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang RPJMD Tahun 2005 – 2025;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;



- q. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- r. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
- s. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2018, dan;
- t. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Biro Pemerintahan dan Kerja Sama adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Rencana Strategi Biro Pemerintahan dan Kerja Sama, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2017, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Tahun 2018, adalah:

1. Merumuskan rancangan program dan pendanaan Tahun 2018;
2. Memberikan arah dan petunjuk tentang tahapan-tahapan program dan kegiatan selama Tahun 2018.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Biro Pemerintahan dan Kerja Sama terdiri dari 4 (empat) Bab yang dapat dijelaskan, sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1. Latar Belakang**

Menjelaskan pengertian tentang Renja Biro Pemerintahan dan Kerja Sama, proses penyusunan Renja Biro Pemerintahan dan Kerja Sama, keterkaitan antara Renstra dan Renja Biro Pemerintahan dan Kerja Sama

dengan Renja Kementerian/Lembaga dan RKPD Provinsi Jawa Barat, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD Provinsi Jawa Barat.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Biro Pemerintahan dan Kerja Sama.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Biro Pemerintahan dan Kerja Sama.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Biro Pemerintahan dan Kerja Sama, serta susunan garis besar isi dokumen.

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BIRO PEMERINTAHAN DAN KERJA SAMA TAHUN 2017**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Tahun 2017 serta Capaian Rencana Strategi Tahun 2013-2018.

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan perkiraan capaian Renstra Tahun 2013-2018, berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Biro Pemerintahan dan Kerja Sama tahun-tahun sebelumnya yang tertera dalam tabel.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Menjelaskan capaian kinerja pelayanan Biro Pemerintahan dan Kerja Sama berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra Biro Pemerintahan dan Kerja Sama, yang bisa dilihat pada tabel sebagaimana terlampir.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Pemerintahan dan Kerja Sama.

Menjelaskan tingkat kinerja pelayanan Biro Pemerintahan dan Kerja Sama, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Biro Pemerintahan dan Kerja Sama

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Menjelaskan hasil review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan hasil analisis kebutuhan pada Biro Pemerintahan dan Kerja Sama.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menjelaskan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

### BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan hasil telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi kegiatan Biro Pemerintahan dan Kerja Sama.



### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Menjelaskan tujuan dan sasaran didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra kegiatan Biro Pemerintahan dan Kerja Sama.

### 3.3. Program dan Kegiatan, berisi penjelasan mengenai :

Menjelaskan program dan kegiatan Biro Pemerintahan dan Kerja Sama pada Tahun 2018 yang dilengkapi dengan lokasi dan indikasi pendanaan yang dibutuhkan berdasarkan sumber dana.

## BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kaidah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Renja Biro Pemerintahan dan Kerja Sama, penegasan komitmen Biro Pemerintahan dan Kerja Sama terhadap Renstra Biro Pemerintahan dan Kerja Sama dan RPJMD, serta penegasan Renja Biro Pemerintahan dan Kerja Sama sebagai acuan penyusunan RKA Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Tahun Anggaran 2018.

## BAB II

# EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BIRO PEMERINTAHAN DAN KERJA SAMA TAHUN 2017

## 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2017 DAN CAPAIAN RENSTRA 2013-2018

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Biro Pemerintahan dan Kerja Sama pada Tahun 2017 berjumlah 5 (lima) program dengan 28 kegiatan, yaitu :

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;

- b. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - c. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - d. Kegiatan Rapat Perencanaan Dalam Daerah dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;
  - e. Kegiatan Pameran LKPJ;
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
  - b. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - c. Kegiatan Penyediaan Cetak dan Penggandaan;
  - d. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;
  - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Profesi Non PNS.
3. Program Pendidikan Politik Masyarakat, dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. Kegiatan Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b. Kegiatan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Prov/Kab/Kota dan Perijinan Pejabat Negara serta Anggota DPRD Prov/Kab/Kota.
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi Daerah, dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. Kegiatan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan di Jawa Barat;
  - b. Kegiatan Penegasan Batas Daerah Antar Provinsi dan Kabupaten/Kota Lintas BKPPW;
  - c. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penegasan Batas Daerah dan Antar Provinsi dan Kab/Kota Lintas BKPPW;
  - d. Kegiatan Penyusunan/Sosialisasi/Pendampingan/Desk/Review LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - e. Kegiatan Evaluasi LPPD Provinsi;
  - f. Kegiatan Regulasi Urusan Pemerintahan Provinsi;
  - g. Kegiatan Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001 2008;
  - h. Kegiatan Persiapan/Monitoring/Evaluasi Penataan Daerah di Jawa Barat.
5. Program Kerja Sama Pembangunan, dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. Kegiatan Penataan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
  - b. Kegiatan Evaluasi Kerja Sama Luar Negeri;

- c. Kegiatan Tindak Lanjut Kerja Sama dengan Pemda Mitra Kerja Sama *Sister Province* dan Pengembangan Kerja Sama Luar Negeri;
- d. Kegiatan Kerja Sama dengan Badan/Lembaga Luar Negeri;
- e. Kegiatan Evaluasi Kerja Sama Daerah;
- f. Kegiatan Pengembangan Kerja Sama Antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- g. Kegiatan Rapat/Advokasi/FGD/Bimtek/Lokakarya Kerja Sama Luar Negeri.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017, Biro Pemerintahan dan Kerja Sama mendapat alokasi anggaran (murni) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 7.699.200.000,-, mengalami peningkatan dari Tahun 2016 dengan anggaran sebesar Rp. 7.279.100.000,-.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian kebijakan program pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama Tahun 2013-2018, yang kemudian direvisi menjadi Rencana Strategis (Renstra) Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Tahun 2017-2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BIRO PEMERINTAHAN DAN KERJA SAMA**

Berdasarkan rancangan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Biro Pemerintahan dan Kerja Sama merupakan salah satu unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif aspek pemerintahan dan kerja sama, meliputi urusan pemerintahan daerah, tata pemerintahan dan kerja sama yang menjadi kewenangan Provinsi, menyelenggarakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Biro Pemerintahan dan Kerja Sama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan umum serta koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif dalam aspek pemerintahan dan kerja sama;
2. penyelenggaraan administrasi Biro;
3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Biro;
4. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya..

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, Biro Pemerintahan dan Kerja Sama memiliki rincian tugas sebagai berikut :

- w. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program Biro;
- x. menyelenggarakan perumusan kebijakan umum aspek pemerintahan dan kerja sama;
- y. menyelenggarakan koordinasi dan pelayanan administratif aspek pemerintahan dan kerja sama meliputi urusan pemerintahan daerah, tata pemerintahan dan kerja sama;
- z. menyelenggarakan supervisi aspek pemerintahan dan kerja sama meliputi urusan pemerintahan daerah, tata pemerintahan dan kerja sama;
- aa. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian aspek pemerintahan dan kerja sama meliputi urusan pemerintahan daerah, tata pemerintahan dan kerja sama;
- bb. menyelenggarakan fasilitasi urusan pemerintahan daerah;
- cc. menyelenggarakan fasilitasi tata pemerintahan;
- dd. menyelenggarakan fasilitasi kerja sama;
- ee. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ketatausahaan Biro dan urusan pemerintahan daerah, tata pemerintahan dan kerja sama;



- ff. menyelenggarakan pembinaan ketatausahaan, teknis fungsional aspek pemerintahan dan kerja sama;
- gg. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi ketatausahaan, urusan pemerintahan daerah, tata pemerintahan dan kerja sama;
- hh. menyelenggarakan perumusan bahan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja (PK), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup Biro;
- ii. menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik (PIP);
- jj. menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP);
- kk. menyelenggarakan pengkoordinasian dan membina Bagian;
- ll. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- mm. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Biro;
- nn. menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial aspek pemerintahan dan kerjasama;
- oo. menyelenggarakan penyampaian saran, pertimbangan aspek pemerintahan dan kerja sama sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- pp. memimpin penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bagian;
- qq. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Biro; dan
- oo. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi termaksud, Biro Pemerintahan dan Kerja Sama membawahkan :

1. Bagian Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Bagian Tata Pemerintahan;
3. Bagian Kerja Sama.

Beberapa kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan Biro Pemerintahan dan Kerja Sama sampai dengan bulan April Tahun 2017 adalah:

1. Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Tersusunnya Rancangan Kebijakan tentang Urusan Pemerintahan Provinsi;
- b. Tersusunnya evaluasi pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta urusan pilihan pemerintahan kabupaten/kota;
- c. Terlaksananya fasilitasi tahapan akhir Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atas LPPD Provinsi Tahun 2015;
- d. Melaksanakan penyusunan LPPD Provinsi Tahun 2016, termasuk penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) tahun 2016;
- e. Terlaksananya pendampingan penyusunan LPPD Kab/Kota Tahun 2016.

2. Tata Pemerintahan

- a. Monitoring dan Evaluasi Rupabumi Unsur Buatan;
- b. Rapat Evaluasi Rupabumi Unsur Buatan;
- c. Rapat Koordinasi Batas Daerah se Jawa Barat;
- d. Rapat Penyelesaian Batas Daerah antara Kabupaten Pangandaran dengan Kabupaten Tasikmalaya;
- e. Rapat Verifikasi Batas Daerah antara Kabupaten Pangandaran dengan Kabupaten Tasikmalaya;
- f. Rapat Fasilitasi/Koordinasi Penataan Administrasi Pertanahan dan Pemerintahan Desa;
- g. Rapat Penyampaian 3 Alternatif penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Cirebon dengan Kota Cirebon;
- h. Rapat Koordinasi Pembahasan Draft Permendagri Batas Daerah di Jakarta;
- i. Monitoring dan Evaluasi Batas Daerah di Jawa Barat.

3. Kerja Sama (Dalam Negeri dan Luar Negeri)

- a. Penjajakan Kerja Sama dan Penandatanganan Lol dengan Provinsi Khartoum, Sudan;
- b. Penjajakan Kerja Sama dan Penandatanganan Lol dengan Provinsi Souss Massa, Maroko;

- c. Penandatanganan MoU dengan 4 daerah di Republik Rakyat Tiongkok (Kota Metropolitan Chongqing, Provinsi Heilongjiang, Provinsi Sichuan, dan Daerah Otonom Guangxi Zhuang);
- d. Penjajakan Kerja Sama dan Penyusunan Draft MoU dengan Wallonia Region, Belgia;
- e. Penjajakan Kerja Sama dan Penyusunan *Work Plan* dengan Prefektur Shizuoka, Jepang;
- f. Penjajakan Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Gelderland, Belanda;
- g. Rapat Pengembangan Kerja Sama Luar Negeri dengan mengundang Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat;
- h. Rapat Sosialisasi Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri;
- i. Rapat Gabungan FKD-MPU dalam rangka penyusunan program dan kegiatan TA 2018 di Provinsi Banten;
- j. Fasilitasi Kerja Sama Antar Daerah Kabupaten/Kota mengenai Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal untuk Wilayah Karawang, Purwakarta dan Subang;
- k. Fasilitasi Kesepakatan Bersama Antar Daerah Kabupaten/Kota mengenai Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal untuk Wilayah Priangan Timur;
- l. Fasilitasi Kesepakatan Bersama Antar Daerah Kabupaten/Kota mengenai Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal untuk Wilayah Cirebon – Kuningan;
- m. Fasilitasi Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah;
- n. Fasilitasi Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta;
- o. Fasilitasi Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten;
- p. Fasilitasi Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dalam Penyediaan Pelayanan Publik;

- q. Fasilitasi Kerja Sama Daerah dalam Pengelolaan Aset Daerah untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
- r. Fasilitasi Kerja Sama Daerah dengan Perguruan Tinggi di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- s. Fasilitasi Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dalam Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil;
- t. Fasilitasi Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dalam Perluasan Layanan BPJS dan Layanan Kesehatan;
- u. Fasilitasi Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dalam Pengembangan Ekspor dan Impor serta Pencetakan Wirausaha Baru.

**Tabel 2.1.**

**FORMAT T-VI.C.5**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja**

**Biro Pemerintahan dan Kerja Sama sampai dengan Bulan April Tahun 2017**

**Provinsi Jawa Barat**

Nama SKPD : Biro Pemerintahan dan Kerja Sama

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Desember Tahun 2018 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2015 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016 (tahun lalu /n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s.d. Tahun 2017 (Thn Berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9) *	11=(10/4)*	12

Nama SKPD : Biro Pemerintahan dan Kerja Sama

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Desember Tahun 2018 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2015 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016 (tahun lalu /n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s.d. Tahun 2017 (Thn Berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%) $8=(7/6)$		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%) $11=(10/4)*$	
1	2	3	4	5	6	7	$8=(7/6)$	9	$10=(5+7+9)*$	$11=(10/4)*$	12
<b>3</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan</b>										
<b>3 01</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, dan Administratif</b>										

3	01	101		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>										
3	01	111	01	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Biro Pemerintahan dan Kerja Sama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	01	111	02	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Penunjang Alat Tulis Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	01	111	03	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Hasil Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	01	111	04	Kegiatan Rapat Perencanaan Dalam Daerah dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Menghadiri Rapat Dalam Daerah, Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	01	111	05	Kegiatan Pameran LKPJ	Terlaksananya Pameran LKPJ Biro	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
<b>3</b>	<b>01</b>	<b>111</b>	<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										
3	01	111	01	Kegiatan Penyediaan	Penyediaan Makanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

				Makanan dan Minuman	dan Minuman Rapat								
3	01	111	02	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Paket Alat Tulis Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	01	111	03	Kegiatan Penyediaan Cetak dan Penggandaan	Hasil Cetakan dan Penggandaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	01	111	04	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	01	111	05	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sewa Mesin Foto Copy	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	01	111	06	Kegiatan Penyediaan Jasa Profesi Non PNS	Jumlah Tenaga Non PNS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>3</b>	<b>01</b>	<b>24</b>		<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>									
3	01	24	01	Kegiatan Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dokumen pemberhentian dan pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Jawa Barat	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
3	01	24	02	Kegiatan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Prov/Kab/Kota dan Perjinan Pejabat Negara serta Anggota	Persentase fasilitasi keanggotaan DPRD Provinsi/Kab/Kota	95%	-	-	-	-	95%	95%	95%



				DPRD Prov/Kab/Kota									
<b>3</b>	<b>01</b>	<b>97</b>		<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi Daerah</b>									
3	01	97	01	Kegiatan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan di Jawa Barat	Tertib administrasi penamaan Rupa Bumi	100%	-	-	-	-	98%	98%	98%
3	01	97	02	Kegiatan Penegasan Batas Daerah Antar Provinsi dan Kabupaten/Kota Lintas BKPPW	Jumlah regulasi penegasan batas daerah sesuai dengan total kebutuhan penetapannya	66	-	-	-	-	33	33	100%
3	01	97	03	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penegasan Batas Daerah Antar Provinsi dan Kabupaten/Kota Lintas BKPPW	Proyeksi pelaksanaan penegasan batas daerah antar Provinsi dan Kabupaten/Kota lintas BKPPW di Jawa Barat	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
3	01	97	04	Kegiatan Penataan Administrasi Pertanahan, Kependudukan dan Pemerintahan Desa	Rekomendasi penyelesaian konflik pertanahan dan permasalahan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
3	01	97	05	Kegiatan Penyusunan / Sosialisasi /	Dokumen LPPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

				Pendampingan / Desk / Review LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Provinsi Dokumen LPPD Kabupaten/Kota									
3	01	97	06	Kegiatan Evaluasi LPPD Provinsi	Peringkat 3	Peringkat III	Peringkat II	Peringkat III	-	-	Peringkat III	Peringkat III	100%	
3	01	97	07	Kegiatan Regulasi Urusan Pemerintahan Provinsi	Persentase peraturan perundang-undangan yang diharmonisasikan terkait dalam sinkronisasi regulasi Otonomi Daerah	100%	85%	90%	90%	90%	95%	95%	95%	
3	01	97	08	Kegiatan Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001 - 2008	Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Proses Penyelenggaraan Naskah Kerja Sama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	01	97	09	Kegiatan Persiapan / Monitong / Evaluasi Penataan Daerah di Jawa Barat	1. Laporan hasil persiapan / monitoring / evaluasi penataan daerah di Jawa Barat 2. Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

3	01	99		<b>Program Kerja Sama Pembangunan</b>										
3	01	99	01	Kegiatan Penataan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga	Jumlah kerja sama dengan perguruan tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM, Organisasi Dalam Negeri	61	12	12	12	100%	12	12	100%	
3	01	99	02	Kegiatan Evaluasi Kerja Sama Luar Negeri	Koordinasi Evaluasi Kerja Sama Luar Negeri; Benchmarking Pengelola Kegiatan Kerja Sama Luar Negeri dengan Pemerintah Daerah Lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	01	99	03	Kegiatan Tindak Lanjut Kerja Sama dengan Pemda Mitra Kerja Sama Sister Province dan Pengembangan Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah kerja sama dengan daerah setingkat di luar negeri	7	1	1	1	100%	2	2%	100%	
3	01	99	04	Kegiatan Kerja Sama dengan Badan/lembaga Luar Negeri	Jumlah kerja sama dengan badan/lembaga luar negeri	5	1	1	1	100%	1	1	100%	
3	01	99	05	Kegiatan Evaluasi Kerja Sama Daerah	Dokumen Evaluasi Kerjasama Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

3	01	99	06	Kegiatan Pengembangan Kerja Sama Antar Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota	Jumlah kerja sama antar daerah (Provinsi dan kabupaten/kota) dan perbatasan	41	7	7	7	100%	5	5	100%	
3	01	99	07	Kegiatan Rapat / Advokasi / FGD / Bimtek / Lokakarya Kerja Sama Luar Negeri	Rapat Koordinasi Evaluasi Kerja Sama Luar Negeri; Rapat Sosialisasi Perjalanann Dinas Luar Negeri\	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

## **2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BIRO PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam perencanaan strategis, yang berdampak secara signifikan bagi tercapainya tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi secara eksternal adalah permasalahan-permasalahan, tantangan dan potensi sebagaimana tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2013 sampai dengan 2018 dan secara internal yang dihadapi oleh Biro Pemerintahan dan Kerja Sama ke depan pada Tahun 2018.

Berdasarkan analisis permasalahan, tantangan dan potensi eksternal serta internal Biro Pemerintahan dan Kerja Sama ke depan, maka dapat dirumuskan isu strategis, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
2. Pelayanan umum; dan
3. Daya saing daerah.

Sebagaimana tertera pada RPJMD Tahun 2013-2018 yang relevan dalam rangka penyelesaian isu isu strategis tersebut di atas, Biro Pemerintahan dan Kerja Sama melalui Tugas dan Fungsinya akan melaksanakan upaya sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Pembagian Urusan Pemerintahan

Otonomi daerah merupakan strategi yang digunakan Pemerintah agar pelayanan kepada masyarakat benar-benar menjadi dasar pelaksanaan manajemen pemerintahan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat semakin meningkat melalui pemberian kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah perlu mempertegas pembagian urusan kepada daerah, melalui Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan UU 23 Tahun 2014 sehingga fungsi penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan belum terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut, Biro Pemerintahan dan Kerja Sama telah merencanakan penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang mengatur Urusan Pemerintahan

Daerah Provinsi serta memfasilitasi pemindahan kewenangan dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan sebaliknya.

- 2) Peningkatan fasilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh OPD Provinsi Jawa Barat.
- 3) Peningkatan fasilitasi dan pembinaan kabupaten/kota dalam rangka Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan.
- 4) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Barat dan fasilitasi penyusunan LPPD kabupaten/kota.  
Sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah diwajibkan menyampaikan LPPD paling lambat tiga bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. LPPD merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi Kepala Daerah sebagai pemimpin daerah kepada pemerintah Pusat dan masyarakat, wujud pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan bahan pembinaan dan evaluasi pemerintah kepada pemerintah daerah. Kementerian dalam Negeri melakukan penilaian atas kinerja pemda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ini dan setiap daerah bersaing dalam pencapaian pemda berkinerja sangat tinggi secara konsisten.
- 5) Penataan Daerah  
Pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013 Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengusulkan/merekomendasikan 4 (empat) calon DOB, yaitu: Calon DOB Kabupaten Bogor Barat (2008), Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi Utara (2009) dan Kabupaten Garut Selatan (2011). Dari 4 (empat) calon DOB dimaksud, yang telah terbentuk /diresmikan menjadi DOB adalah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2013 yang merupakan hak inisiatif DPR. Berkaitan dengan diberlakukannya moratorium pembentukan Daerah Otonom Baru maka, penataan daerah difokuskan pada fasilitasi persiapan pembentukan DOB. Selain DOB, program dan kegiatan Biro akan difokuskan dalam fasilitasi pembentukan kecamatan dan peningkatan kualitas kinerja kecamatan.
- 6) Peningkatan kualitas dokumen perencanaan Biro.

## 2. Tata Pemerintahan

Langkah-langkah yang ditetapkan Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi isu-isu strategis tersebut adalah :

- 1) Meningkatkan jumlah dan kompetensi aparatur untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan monev pemerintahan umum;
- 2) Mengoptimalkan sarana prasarana dan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN untuk meningkatkan pelaporan pemerintahan umum;
- 3) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program dengan Provinsi perbatasan (Banten, Jawa Tengah dan DKI) dan kabupaten/kota;
- 4) Membangun jaringan dan kemitraan dengan organisasi masyarakat yang bersifat konstruktif di bidang pemerintahan umum.

## 3. Kerja Sama

- 1) Kegiatan dan program untuk mendukung isu-isu daerah sebagai berikut:
  - a. Kualitas pendidikan, dengan fokus substansi kerjasama dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian pada masyarakat (tridharma Perguruan Tinggi) dan pembangunan Jawa Barat;
  - b. Kualitas lingkungan hidup, dengan fokus substansi kerjasama dalam peningkatan pelayanan persampahan, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
  - c. Kualitas kesehatan dengan fokus substansi kerja sama dalam peningkatan pelayanan kesehatan, kesehatan rujukan dan pelayanan obat serta SDM kesehatan;
  - d. Kualitas pelayanan dasar antara lain pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional;
  - e. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan fokus substansi kerja sama pencetakan wirausaha baru, pemberdayaan koperasi dan usaha kecil khususnya pengembangan dan peningkatan kualitas SDM, akses pembiayaan, pasar dan teknologi tepat guna serta kelembagaan. Di samping itu, dilakukan pula peningkatan perlindungan hukum bagi masyarakat miskin, berupa bantuan hukum secara litigasi. Ketenagakerjaan, dengan fokus substansi kerjasama dalam peningkatan kualitas tenaga kerja;
  - f. Kualitas infrastruktur strategis, seperti jalan tol, badarudara, ketenagalistrikan dan infrastruktur strategis lainnya;

- g. Ketenagakerjaan dengan fokus substansi kerja sama dalam peningkatan kualitas tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja, termasuk TKI asal Jawa Barat di luar negeri;
  - h. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien dengan fokus substansi kerjasama dalam peningkatan kapasitas SDM aparatur, penerapan e-Government dan pembentukan aparatur yang bersih dan bebas KKN. Disamping itu, dilakukan pula kerja sama dalam peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah;
  - i. Penanggulangan bencana dengan fokus substansi kerjasama dalam peningkatan kemampuan penanganan bencana alam dan perlindungan sosial korban bencana;
  - j. Pengembangan energi baru dan terbarukan dengan fokus substansi kerjasama dalam peningkatan kapasitas pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
  - k. Pengembangan industri wisata Jawa Barat dengan fokus substansi kerjasama dalam peningkatan pengelolaan destinasi wisata, pemberdayaan masyarakat di tempat wisata, termasuk peningkatan status Geopark Nasional Ciletuh- Palabuhanratu menjadi Unesco Global Geopark;
  - l. Isu strategis lainnya sesuai program kerjasama.
- 2) Optimalisasi pemanfaatan peluang kerjasama teknik dalam negeri dan luar negeri. Seiring dengan telah terjadinya peningkatan penawaran keikutsertaan dalam program-program kerjasama tekniku luar negeri, berupa *capacity building* dan bantuan sarana prasarana yang dilakukan oleh pihak luar negeri (*training, transfer knowledge, experts exchange*), kondisi ini merupakan peluang untuk meningkatkan wawasan sumber daya aparatur dan performa kinerja/pelayanan dalam mendorong dan mensukseskan keberhasilan pembangunan di Jawa Barat.
- 3) Pengembangan kesempatan penerimaan bantuan/hibah luar negeri. Keterbatasan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah menuntut kreativitas dari unit kerja terkait untuk mendapatkan sumber daya alternatif guna memenuhi kebutuhan pembangunan. Hibah luar negeri merupakan salah satu alternatif untuk melengkapi keterbatasan implementasi pembangunan. Melihat potensi dan peluang penerimaan hibah luar negeri baik yang terencana maupun hibah langsung, diperlukan



langkah-langkah proaktif untuk menangkap peluang tersebut. Selain menerima hibah, daerah dituntut pula untuk dapat meningkatkan kapasitasnya.

- 4) Peningkatan implementasi kerjasama internasional di daerah. Terkait dengan urusan politik luar negeri yang tidak didesentralisasikan ke daerah, maka rentang birokrasi dan prosedur dalam pelaksanaan kerjasama luar negeri dapat dipersingkat dengan menjadikan Jawa Barat sebagai lokasi pelaksanaan kerjasama internasional yang digagas oleh Pemerintah.
- 5) Akselerasi pelaksanaan kerjasama Provinsi Bersaudara  
Efektivitas implementasi kerjasama provinsi bersaudara membutuhkan waktu yang panjang. Kondisi ini membutuhkan konsistensi kebijakan untuk menciptakan nuansa saling memahami diantara para pihak yang berujung pada pelaksanaan sektor-sektor kerjasama yang sudah menjadi komitmen bersama

## **2.4 REVIEW TERHADAP RKPD PROVINSI JAWA BARAT 2017**

Dalam menyusun sasaran program dan kegiatan Biro Pemerintahan dan Kerja Sama mengacu pada Kebijakan Nasional maupun Kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini RPJMD 5 tahunan yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Renstra OPD dan RKPD tahunan. Dalam implementasinya sering terjadi ketidaksinergian antara kebijakan karena masing-masing mengacu pada kebijakan baru yang harus dilaksanakan, sehingga terdapat kelemahan tertentu yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, diantaranya kurangnya informasi dari Pemerintah, sehingga kebijakan itu tidak dapat diakomodir dan diimplementasikan di daerah.

Untuk Rencana Kerja Tahun 2017 telah disusun dengan cukup matang namun dengan adanya SOTK baru sehingga ada kegiatan yang tidak masuk di RKPD, hal ini akan menimbulkan perubahan terhadap rancangan awal RKPD. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017, sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :
  - a. Penyediaan Makanan dan Minuman

- b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - d. Rapat Perencanaan Dalam Daerah dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
  - e. Pameran LKPJ
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
- a. Penyediaan Makanan dan Minuman
  - b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - c. Penyediaan Cetak dan Penggandaan
  - d. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
  - e. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapann Kantor
  - f. Penyediaan Jasa Profesi Non PNS
3. Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan kegiatan :
- a. Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  - b. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Prov/Kab/Kota dan Perijinan Pejabat Negara serta Anggota DPRD Prov/Kab/Kota
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi Daerah, dengan kegiatan :
- a. Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan di Jawa Barat
  - b. Penegasan Batas Daerah Antar Provinsi dan Kabupaten/Kota Lintas BKPPW
  - c. Monitoring dan Evaluasi Penegasan Batas Daerah Antar Provinsi dan Kab/Kota Lintas BKPPW
  - d. Penyusunan/Sosialisasi/Pendampingan/Desk/Review LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota
  - e. Evaluasi LPPD Provinsi
  - f. Penataan Administrasi Pertanahan, Kependudukan dan Pemerintahan Desa
  - g. Regulasi Urusan Pemerintahan Provinsi
  - h. Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2008
  - i. Persiapan Monitoring/Evaluasi Penataan Daerah di Jawa Barat
5. Program Kerja Sama Pembangunan, dengan kegiatan :
- a. Penataan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga
  - b. Evaluasi Kerja Sama Luar Negeri
  - c. Tindak Lanjut Kerja Sama dengan Pemda Mitra Kerja Sama *Sister Province* dan Pengembangan Kerja Sama Luar Negeri
  - d. Kerja Sama dengan Badan/Lembaga Luar Negeri

- e. Evaluasi Kerja Sama Daerah
- f. Pengembangan Kerja Sama Antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
- g. Rapat/Advokasi/FGD/Bimtek/Lokakarya Kerja Sama Luar Negeri

Pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang ada di Biro Pemerintahan dan Kerja Sama mencerminkan visi dan misi biro dengan kegiatan tersebar di provinsi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif aspek pemerintahan dan kerjasama, meliputi urusan pemerintahan daerah, tata pemerintahan dan kerja sama yang menjadi kewenangan Provinsi, menyelenggarakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

**Tabel.T-VI.C.1**

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 (n-1)**

**Provinsi Jawa Barat**

**(dalam ribuan)**

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Keb Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>A. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>										
1.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bandung	Penyediaan Makan dan Minum Rapat	100%	12.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bandung	Terfasilitasi nya penyediaan makan dan minum rapat	100%	12.000	
2.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bandung	Paket alat tulis kantor	100%	3.545	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bandung	Tersedianya Penunjang Alat Tulis Kantor	100%	3.545	
3.	Penyediaan Barang	Bandung	Hasil cetak dan	100%	5.430	Penyediaan Barang Cetak dan	Bandung	Terfasilitasi nya barang	100%	5.430	

	Cetakan dan Penggandaan		penggandaan			Penggandaan		cetakan dan penggandaan untuk peningkatan kinerja			
--	-------------------------	--	-------------	--	--	-------------	--	---	--	--	--

4.	Rapat Perencanaan Dalam Daerah dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jawa Barat dan Luar Provinsi	Menghadiri Rapat Dalam Daerah, Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Provinsi	100%	70.000	Rapat Perencanaan Dalam Daerah dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jawa Barat dan Luar Provinsi	Terlaksananya peningkatan kinerja	100%	70.000	
5.	Pameran LKPJ	Bandung	Terlaksananya Pameran LKPJ	100%	5.000	Pameran LKPJ	Bandung	Terfasilitasinya pameran LKPJ Tingkat Provinsi Jabar dalam rangka peningkatan kinerja Biro	100%	5.000	
	<b>B. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>										
6.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bandung	Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	12.600.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bandung	Terlaksananya tugas dan fungsi Biro	100%	12.600	
7.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bandung	Paket Alat Tulis Kantor	100%	11.254,764	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bandung	Tersedianya penunjang alat tulis kantor	100%	11.254,764	
8.	Penyediaan Cetak dan Penggandaan	Bandung	Hasil cetakan dan penggandaan	100%	18.800	Penyediaan Cetak dan Penggandaan	Bandung	Tersedianya cetakan dan penggandaan	100%	18.800	
9.	Rapat Koordinasi dan	Dalam dan Luar	Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100%	549.769,340	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dalam dan	Terwujudnya	100%	549.769,340	

	Konsultasi Keluar Daerah	Provinsi	dan Luar Provinsi			Keluar Daerah	Luar Provinsi	peningkatan kinerja pegawai Biro			
10.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bandung	Sewa Mesin Foto Copy	100%	18.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bandung	Tersedianya kebutuhan pengandaan dokumen	100%	18.000	
11.	Penyediaan Jasa Profesi Non PNS	Bandung	Jumlah Tenaga Non PNS	100%	393.600,896	Penyediaan Jasa Profesi Non PNS	Bandung	Tersedianya jasa tenaga non PNS untuk menunjang operasional Biro	100%	393.600,896	
	<b>C. Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>										
12.	Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bekasi, Kota Cimahi dan Kota Tasikmalaya	Dokumen pemberhentian dan pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Jawa Barat	100%	420.000	Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bekasi, Kota Cimahi dan Kota Tasikmalaya	Terlaksananya tertib administrasi pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah di Jawa Barat	100%	420.000	
13.	Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Prov/Kab/Kota dan Perijinan Pejabat Negara	Kab/Kota se Jawa Barat	Presentase fasilitasi keanggotaan DPRD Provinsi dan Kab/Kota	95%	175.000	Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Prov/Kab/Kota dan Perijinan	Kab/Kota se Jawa Barat	Terlaksananya fasilitasi keanggotaan DPRD	95%	175.000	

	serta Anggota DPRD Prov/Kab/Kota					Pejabat Negara serta Anggota DPRD Prov/Kab/Kota		Provinsi dan Kab/Kota			
--	-------------------------------------	--	--	--	--	---	--	--------------------------	--	--	--



	<b>D. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi Daerah</b>										
14.	Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan di Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Tertib administrasi penamaan Rupa Bumi	90%	210.000	Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan di Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Terlaksananya tertib administrasi penamaan rupabumi unsur buatan	90%	210.000	
15.	Penegasan Batas Daerah Antar Provinsi dan Kabupaten/Kota Lintas BKPPW	Provinsi Jawa Barat	Jumlah regulasi penegasan batas daerah sesuai dengan total penetapan kebutuhannya	66	250.000	Penegasan Batas Daerah Antar Provinsi dan Kabupaten/Kota Lintas BKPPW	Provinsi Jawa Barat	Tersedianya produk hukum dan peta penetapan batas daerah antar Provinsi dan Kabupaten / Kota Lintas BKPPW di Jawa Barat	66	250.000	
16.	Monitoring dan Evaluasi Penegasan Batas Daerah Antar Provinsi dan Kab/Kota lintas BKPPW	Provinsi Jawa Barat dan Luar Provinsi Jawa Barat	Proyeksi pelaksanaan penegasan batas daerah antar Provinsi dan kabupaten/kota lintas BKPPW di Jawa Barat	100%	150.000	Monitoring dan Evaluasi Penegasan Batas Daerah Antar Provinsi dan Kab/Kota lintas BKPPW	Provinsi Jawa Barat dan Luar Provinsi Jawa Barat	Tersedianya dokumen/ data hasil monev penegasan batas daerah antar Provinsi dan kab/kota	100%	150.000	

								lintas BKPPW di Jawa Barat			
17.	Penyusunan / Sosialisasi / Pendampingan / Desk / Review LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jawa Barat	Dokumen LPPD Provinsi dan LPPD Kab/Kota	100%	900.000	Penyusunan / Sosialisasi / Pendampingan / Desk / Review LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jawa Barat	Tersedianya data penyelenggaraan pemerintahan daerah	100%	900.000.	
18.	Evaluasi LPPD Provinsi	27 Kabupaten / Kota di Jawa Barat	Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan 'daerah Provinsi Tahun 2017	Peringkat III	278.671,750	Evaluasi LPPD Provinsi	27 Kabupaten / Kota di Jawa Barat	Terlaksananya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi	Peringkat III	278.671,750	
19.	Regulasi Urusan Pemerintahan Provinsi	Bandung	Persentase peraturan perundang-undangan yang diharmonisasikan terkait dalam sinkronisasi regulasi Otonomi Daerah	95%	184.895	Regulasi Urusan Pemerintahan Provinsi	Bandung	Tertatanya penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi	95%	184.895	
20.	Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008	Jawa Barat	Pemeliharaan sertifikasi manajemen mutu ISO 9001 : 2008 pada proses penyelenggaraan naskah kerja sama	100%	31.500	Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008	Jawa Barat	Terwujudnya naskah kerja sama yang terstandarisasi ISO 9001 : 2008	100%	31.500	

21.	Persiapan Monitoring / Evaluasi Penataan Daerah di Jawa Barat	Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kab. Garut, Kab. Pangandaran Provinsi Jawa Barat	Tersedianya dokumen laporan hasil persiapan / monitoring / evaluasi penataan daerah di Jawa Barat dan dokumen hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan daerah	100%	175.000	Persiapan Monitoring / Evaluasi Penataan Daerah di Jawa Barat	Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kab. Garut, Kab. Pangandaran Provinsi Jawa Barat	Tersedianya dokumen penataan daerah di Jawa Barat dan data hasil EKPOD sebagai bahan evaluasi	100%	175.000	
	<b>E. Program Kerjasama Pembangunan</b>										
22.	Penataan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga	Jawa Barat	Jumlah kerja sama dengan perguruan tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dan Organisasi Dalam Negeri	12	350.000	Penataan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga	Jawa Barat	Terlaksananya kegiatan penataan kerja sama daerah dengan pihak ketiga	12	350.000	
23.	Evaluasi Kerja Sama Luar Negeri	Bandung, Jawa Barat	Koordinasi evaluasi kerja sama luar negeri; Benchmarking pengelola kegiatan kerja sama luar negeri dengan pemerintah daerah lainnya	100%	207.161,050	Evaluasi Kerja Sama Luar Negeri	Bandung, Jawa Barat	Terlaksananya dan tersedianya dokumen evaluasi kerja sama daerah dengan pemerintah dan dengan badan/lembaga luar negeri	100%	207.161,050	

24.	Tindak Lanjut Kerja Sama dengan Pemda Mitra Kerja Sama Sister Province dan Pengembangan Kerja Sama Luar Negeri	Jawa Barat, DKI Jakarta, Luar Negeri	Jumlah kerja sama dengan daerah setingkat di luar negeri	1	2.037.400	Tindak Lanjut Kerja Sama dengan Pemda Mitra Kerja Sama Sister Province dan Pengembangan Kerja Sama Luar Negeri	Jawa Barat, DKI Jakarta, Luar Negeri	Tercapainya program kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam kerangka kerja sama dan implementasi kerja sama dengan Sister Province	1	2.037.400	
-----	--	--------------------------------------	--	---	-----------	--	--------------------------------------	---	---	-----------	--

25.	Kerja Sama dengan Badan/Lembaga Luar Negeri	Provinsi Jawa Barat	Jumlah kerja sama dengan Badan/Lembaga Luar Negeri	1	316.260	Kerja Sama dengan Badan/Lembaga Luar Negeri	Provinsi Jawa Barat	Peningkatan kerja sama lembaga luar negeridengan n OPD Provinsi dan Kabupaten / Kota	1	316.260	
26.	Evaluasi Kerja Sama Daerah	Jawa Barat dan Luar Provinsi	Dokumen Evaluasi Kerja Sama Daerah	100%	394.480	Evaluasi Kerja Sama Daerah	Jawa Barat dan Luar Provinsi	Peningkatan kerja sama daerah provinsi, kab/kota, pihak ketiga	100%	394.480	
27.	Pengembangan Kerja Sama Antar Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota	Jawa Barat dan Luar Provinsi	Jumlah kerja sama antar daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) dan Perbatasan	5	466.426	Pengembangan Kerja Sama Antar Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota	Jawa Barat dan Luar Provinsi	Laporan hasil kerja sama antar daerah provinsi/kab /kota	5	466.426	
28.	Rapat / Advokasi / FGD / Bimtek / Lokakarya Kerja Sama Luar Negeri	Bandung, Jawa Barat	Rapat Koordinasi Evaluasi Kerja Sama Luar Negeri; Rapat Sosialisasi Perjalanan Dinas Luar Negeri	100%	52.406,200	Rapat / Advokasi / FGD / Bimtek / Lokakarya Kerja Sama Luar Negeri	Bandung, Jawa Barat	Terlaksananya dan tersedianya dokumen evaluasi kerja sama luar negeri; Terlaksananya dan tersedianya dokumen sosialisasi kerja sama	100%	52.406,200	

								luar negeri			
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--

## **2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT (TIDAK ADA)**

Menjelaskan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, dengan dilengkapi dengan tabel usulan program dan kegiatan para pemangku kepentingan.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Rencana Kerja Biro Pemerintahan dan Kerja Sama merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Renja OPD merupakan penjabaran dari Renstra OPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Era Reformasi telah menimbulkan pergeseran orientasi tata kelola pemerintahan dari yang semula sangat sentralistik menjadi lebih desentralistik dengan diberikannya wewenang otonomi daerah kepada Pemerintah Daerah, sebagaimana telah ditetapkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2000 telah ditetapkan Ketetapan MPR No.IV/MPR/2000 tentang Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang antara lain merekomendasikan bahwa prinsip otonomi daerah itu harus dilaksanakan dengan menekankan pentingnya kemandirian dan keprakarsaan dari daerah-daerah otonom untuk menyelenggarakan otonomi daerah tanpa harus terlebih dulu menunggu petunjuk dan pengaturan dari pemerintahan pusat. Bahkan, kebijakan nasional otonomi daerah ini telah dikukuhkan pula dalam materi perubahan Pasal 18 UUD 1945, sehingga penyelenggaraan otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal, dimana untuk mewujudkan keadaan tersebut, berlaku proposisi bahwa pada dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkannya, kecuali untuk persoalan-persoalan yang memang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri dalam perspektif keutuhan negara-bangsa.

Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang otonomi yang memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan



bertanggung jawab, adanya perimbangan tugas fungsi dan peran antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian diharapkan masing-masing daerah akan dapat lebih maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah timbul ketidakharmonisan antara Pusat dan Daerah, dikarenakan kurangnya informasi dan sosialisasi dari pemerintah sehingga kebijakan tersebut tidak dapat diakomodir dan diimplementasikan di daerah hingga muncul beberapa permasalahan antara lain adanya eksploitasi pendapatan daerah, pemahaman terhadap konsep otonomi daerah yang belum mantap, penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai, kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah, korupsi di daerah, dan potensi munculnya konflik antar daerah. Oleh karena itu, muncul tuntutan baru bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan kedalam dengan melakukan penataan otonomi daerah dan reformasi birokrasi.

Rencana Kerja Tahun 2018 merupakan tahun ke empat dari periode RPJMN ke-3 (2015-2019) dan tahun ke lima dari RPJMD Provinsi Jawa Barat (2013-2018), dan program/kegiatan Tahun 2018 merupakan lanjutan dari rencana kerja Tahun 2017. Seiring dengan perubahan SOTK Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, maka terbentuklah Biro Pemerintahan dan Kerja Sama yang merupakan gabungan dari Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama dan Biro Pemerintahan Umum

Biro Pemerintahan dan Kerja Sama sesuai dengan tupoksinya memiliki tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang disusun berdasarkan kepada kebijakan Nasional maupun kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2013-2018 dan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra OPD tahun 2013-2018, RKPD serta Renja OPD.

### 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BIRO PEMERINTAHAN DAN KERJA SAMA

Tujuan dan Sasaran dari Rencana Kerja Biro Pemerintahan dan Kerja Sama dirumuskan dengan mengacu pada Renstra SKPD, RPJMD 2013-2018 selain juga menyerap aspirasi terkini dari masyarakat. Untuk Tahun 2018 kebijakan yang akan diambil sebagai berikut :

<b>SASARAN KINERJA RENSTRA 2013-2018</b>	<b>ISU TAHUN 2018</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya bahan perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah.</li> <li>2. Terselenggaranya fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penataan daerah.</li> <li>3. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.</li> </ol>	<p>Kualitas perumusan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penataan daerah</p>	<p>Peningkatan koordinasi dengan OPD/unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Barat, pelibatan akademisi dan profesional dalam perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penataan daerah, peningkatan ketersediaan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan, peningkatan pembinaan dan pengawasan.</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terciptanya pemerintahan Desa/ Kelurahan yang baik dan sesuai dengan Peraturan</li> </ol>	<p>Tata pemerintahan yang baik di Jawa Barat</p>	<p>Koordinasi, fasilitasi dan pendampingan kegiatan pemerintahan di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.</p>

SASARAN KINERJA RENSTRA 2013-2018	ISU TAHUN 2018	KEBIJAKAN
<p>Perundang-undangan</p> <p>2. Tegasnya batas daerah :</p> <p>    a. Jawa Barat dengan Jawa Tengah dan Provinsi DKI</p> <p>    b. Antar Kab/Kota</p> <p>    c. Antar Desa/ Kelurahan</p> <p>3. Terciptanya tertib administrasi pengangkatan, penetapan dan pemberhentian Kepala Daerah dan anggota DPRD serta izin kampanye dan ke luar negeri dengan alasan penting bagi Kepala Daerah dan anggota DPRD</p> <p>4. Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi administrasi pembakuan nama rupabumi.</p> <p>5. Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi administrasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan Tanah Kas Desa.</p> <p>6. Terciptanya akurasi data kependudukan dan terlaksananya administrasi pencatatan sipil di</p>		

SASARAN KINERJA RENSTRA 2013-2018	ISU TAHUN 2018	KEBIJAKAN
Jawa Barat		
1. Optimalisasi penyusunan dan implementasi kebijakan kerja sama daerah. 2. Tersedianya dokumen kerja sama daerah 3. Meningkatnya fasilitasi, koordinasi dan implementasi kerja sama daerah 4. Tersusunnya evaluasi kerja sama daerah sebagai bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian	Kualitas perumusan bahan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan kerja sama daerah	Peningkatan koordinasi dengan pemerintah, kab/kota dan OPD provinsi, pelibatan akademisi dan profesional dalam perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan kerja sama daerah, optimalisasi peran TKKSD, peningkatan ketersediaan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan, peningkatan pembinaan dan pengawasan.

Rencana Kerja Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Tahun 2018 disusun untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah antara Kebijakan Nasional dan Kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang terjadi Tahun 2018.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dilaksanakan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban Biro Pemerintahan dan Kerja Sama, yang mencakup kebijakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi Daerah serta Kerja Sama Pembangunan. Adapun kebijakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi Daerah serta Kerja Sama Pembangunan dilaksanakan aktivitas sebagai berikut :

1. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
2. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan tata pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
3. Peningkatan kerja sama antar daerah baik dalam negeri maupun dengan luar negeri;

### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Tahun 2018, Biro Pemerintahan dan Kerja Sama akan melaksanakan 18 kegiatan yang diakomodasikan dalam 5 program, sebagai implementasi rencana kegiatan jangka menengah serta untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam merumuskan kebijakan dan fasilitasi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah, tata pemerintahan, dan kerja sama baik dalam negeri maupun luar negeri.

Secara rinci program dan kegiatan pada Biro Pemerintahan dan Kerja Sama adalah sebagai berikut :

6. Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan kegiatan :
  - a) Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b) Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Perijinan Pejabat Negara serta Anggota;
  - c) Desk Pilkada.
7. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi Daerah, dengan kegiatan:
  - a. Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Jawa Barat;
  - b. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) di Jawa Barat;
  - c. Penegasan Batas Daerah Antar Provinsi dan Kab/Kota di Jawa Barat;
  - d. Pembakuan Nama Rupabumi di Jawa Barat;
  - e. Persiapan/Monitoring/Evaluasi Penataan Daerah di Jawa Barat;
  - f. Sinergitas/Regulasi Urusan Pemerintahan Provinsi;
  - g. Penataan Administrasi Kependudukan, Pertanahan dan Pemerintahan Desa;
  - h. Analisis Pelaksanaan ISO 9001-2008;
  - i. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.
8. Program Kerja Sama Pembangunan, dengan kegiatan:
  - a. Penataan dan Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
  - b. Evaluasi Kerja Sama;
  - c. Kerja Sama Luar Negeri;
  - d. Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional APPSI Tahun 2018.
9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Internal pada Biro Pemerintahan dan Kerja Sama.

10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Pemerintahan dan Kerja Sama.

# **Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Tahun 2018**

**dan Prakiraan Maju Tahun 2019**

Nama SKPD : Biro Pemerintahan dan Kerja Sama

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib</b>									
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>								
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>							
1	5	24	01 Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan organisasi / partai politik	Kab/Kota di Jabar	100%	400.000.000	APBD	100%	450.000.000
1	5	24	02 Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Perijinan Pejabat Negara serta Anggota;	Tingkat partisipasi politik	Kab/Kota se Jabar	100%	200.000.000	APBD	100%	225.000.000
1	5	24	03 Desk Pilkada Provinsi	Terselenggaranya Pilkada yang baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jabar	Prov Jabar	100%	900.000.000	APBD	100%	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
<b>3</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan</b>											
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>Perencanaan</b>										
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>97</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Sistem Administrasi Daerah</b>	<b>Terbangunnya dan tersusunnya sistem Administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat</b>								
3	1	97	4	Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Jawa Barat	Tingkat fasilitasi koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Jawa Barat	100%	900.000.000	APBD		100%	1.000.000.000
3	1	97	5	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) di Jawa Barat	Tingkat fasilitasi koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	27 Kab/Kota di Jabar	100%	150.000.000	APBD		100%	300.000.000
3	1	97	6	Penegasan Batas Daerah Antar Provinsi dan Kab/Kota di Jawa Barat	Jumlah Regulasi Penegasan Batas Daerah	Prov Jabar	100%	200.000.000	APBD			250.000.000
3	1	97	7	Pembakuan Nama Rupabumi di Jawa Barat	Tertib Administrasi Penamaan Rupa Bumi	Prov Jabar		100.000.000	APBD		100%	200.000.000
3	1	97	8	Persiapan Monitoring/Evaluasi Penataan Daerah di Jawa Barat	Persentase kemampuan Daerah Otonom Baru (DOB) dalam penyelenggaraan pemerintahan	Kab/Kota di Jabar		100.000.000	APBD			200.000.000
3	1	97	9	Sinergitas/Regulasi Urusan Pemerintahan Provinsi	Terwujudnya ketatalaksanaan yang efektif dan efisien untuk tata	Prov Jabar		200.000.000	APBD			250.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
		pemerintahan yang baik									
3	1	97	10	Penataan Administrasi Kependudukan, Pertanahan dan Pemerintahann Desa	Jumlah penataan administrasi yang dapat diselesaikan	Prov Jabar	100%	200.000.000	APBD		300.000.000
3	1	97	11	Analisis Pelaksanaan ISO 9001-2008	Proporsi PD yang bersertifikat ISO	Jawa Barat	100%	50.000.000	APBD		75,000.000
3	1	97	12	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Tingkat kapasitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Jawa Barat	100%	100.000.000	APBD		150.000.000
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>99</b>		<b>Program Kerja Sama Pembangunan</b>	<b>Kerjasama pembangunan antara daerah, kabupaten/kota dan provinsi, dan luar negeri</b>						
3	1	99	13	Penataan dan Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah	Jumlah kerja sama dalam negeri yang berbadan hukum	Jawa Barat	100%	400.000.000	APBD	100%	450.000.000
3	1	99	14	Evaluasi Kerja Sama	Terwujudnya kerja sama pembangunan dalam dan luar negeri	Jawa Barat	100%	400.000.000	APBD	100%	450.000.000
3	1	99	15	Kerja Sama Luar Negeri	Terwujudnya kerja sama pembangunan dengan luar negeri	Jabar, DKI Jakarta, Luar Negeri	100%	1.350.000.000	APBD	-	1.500.000.000
3	1	99	16	Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional APPSI Tahun 2018	Terselenggaranya Rapat Kerja Pemerintahan Provinsi se Indonesia	Jawa Barat	100%	1.250.000.000	APBD	100%	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>3 2 101</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>								
3 2 101 17	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Laporan Internal pada Biro Pemerintahan dan Kerja Sama	Tingkat pemenuhan kebutuhan penunjang kegiatan capaian Biro Pemerintahan dan Kerja Sama	Jabar, DKI	100%	200.000.000	APBD		100%	300.000.000
<b>3 5</b>	<b>Fungsi Lain</b>								
3 5 111	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>								
3 5 111 18	Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Pemerintahan dan Kerja Sama	Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional Biro	Prov. Jabar, DKI, Luar Provinsi Jabar	100%	1.200.000.000	APBD		100%	1.500.000.000

al jumlah kebutuhan dana/ pagu indikatif:

Rencana tahun 2018 sebesar Rp. 8.300.000.000,-  
Rencana tahun 2019

2019

sebesar

Rp.

7.60

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Tahun 2018 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Tahun 2013-2018 yang telah mengalami perubahan menjadi Rencana Strategis Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Tahun 2017-2018 dikarenakan adanya perubahan SOTK Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Rencana Kerja Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Tahun 2017 dan evaluasi kerja Biro Pemerintahan dan Kerja Sama.

Sebagai dokumen rencana operasional, Rencana Kerja Biro Pemerintahan dan Kerja Sama diarahkan pada pencapaian tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan Tahun 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan dan Kerja Sama yang membawahi 3 (tiga) Bagian yaitu Bagian Urusan Pemerintahan Daerah, Bagian Tata Pemerintahan, dan Bagian Kerja Sama.

Rencana Kerja Biro Pemerintahan dan Kerja Sama ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan Biro Pemerintahan dan Kerja Sama guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.